

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK / ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	40
1.3 Tujuan Penelitian	40
1.4 Manfaat Penelitian	41
1.4.1 Manfaat Teoritis	41
1.4.2 Manfaat Praktis	41
1.5 Originalitas / Keaslian Penelitian	42
1.6 Sistematika Penulisan	45
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	46
2.1 Landasan Teori	46
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	64
2.1.2 Teori Hukum Responsif	66
2.1.2.1 Perdebatan Hukum Responsif	71

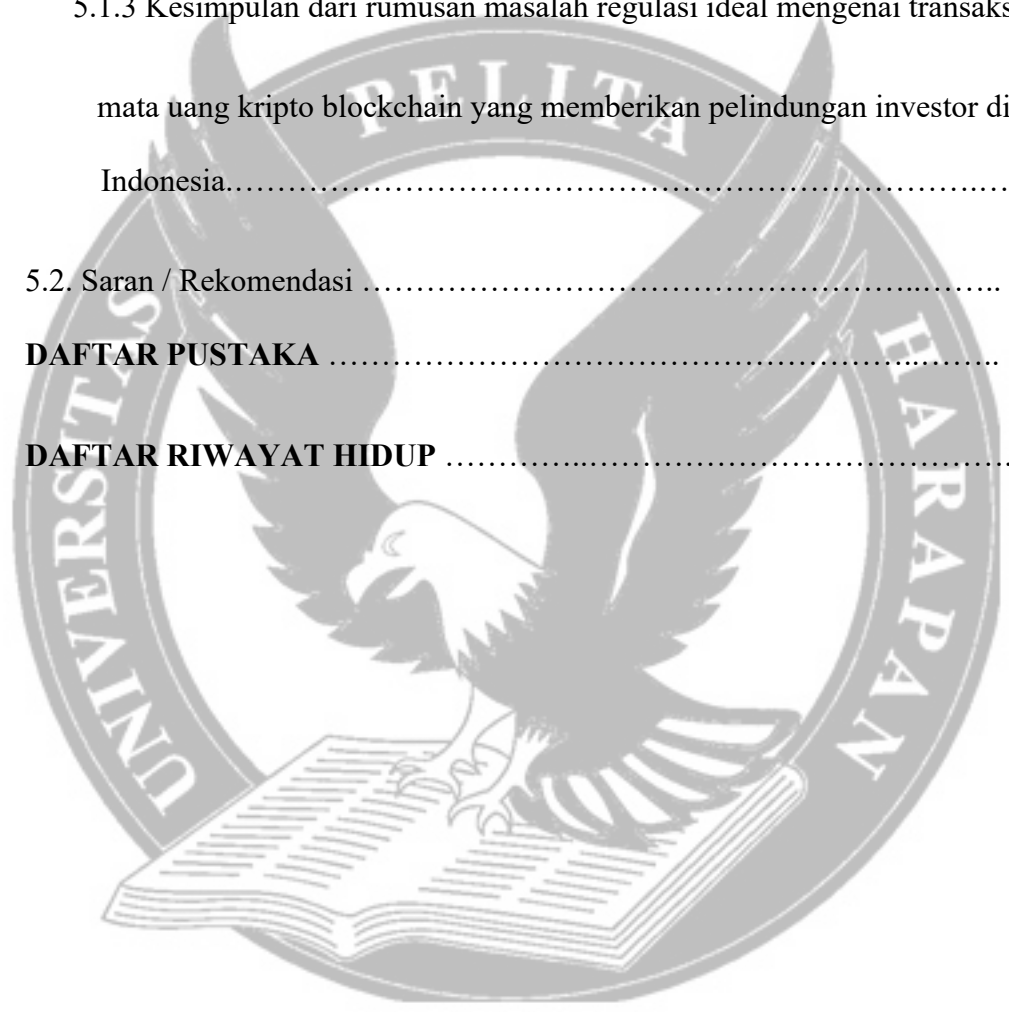
2.1.3. Teori Pelindungan Hukum Konsumen	88
2.2 Landasan Konseptual	97
2.2.1 Teknologi Internet	99
2.2.2 Konsep Blockchain	102
2.2.3 Konsep Mata Uang kripto	122
2.2.4 Konsep Smart Contract	132
2.2.5 Bursa Kripto Nusantara	140
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	149
3.1 Bentuk dan Pendekatan Penelitian	149
3.1.1 Jenis Penelitian	151
3.1.2 Pendekatan Penelitian	152
3.2 Bahan Hukum	157
3.2.1 Bahan Hukum Primer	158
3.2.2 Bahan Hukum Sekunder	160
3.2.3 Bahan Hukum Tersier	161
3.2.4 Bahan Non Hukum	161
3.3 Teknik Pengumpulan/Cara Perolehan Data	161
3.4 Jenis Data	163
3.5 Pengolahan dan Analisa Data	163
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	164
4. 1 Pembahasan Peraturan.....	164

4.1.1 Norma pengaturan terhadap perlindungan investor terkait transaksi blockchain dalam perspektif peraturan perundang - undangan di Indonesia	172
4.1.1.1 Pengaturan terhadap perlindungan investor blockchain ditinjau dari KUH Perdata dan KUH Pidana	183
4.1.1.2 Pengaturan terhadap perlindungan investor ditinjau dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen	186
4.1.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	188
4.1.1.4 UU RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan(P2SK) terkait pengaturan kripto untuk melindungi investor transaksi blockchain.....	189
4.1.1.5 Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto dan Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	194
4.1.1.6 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.....	202
4.1.1.7 Studi perbandingan pengaturan hukum terhadap perlindungan investor blockchain di Asia / Asia Tenggara	206

4.2 Implementasi perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi blockchain	207
4.2.1 Evaluasi Implementasi perlindungan hukum terhadap investor blockchain dan tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha dalam transaksi blockchain	214
4.2.2 Kasus penipuan dan pelanggaran transaksi blockchain yang merugikan investor dan terjadi di Indonesia	227
4.2.3 Kendala yuridis dan sosiologis yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku transaksi blockchain	231
4.2.3.1 Kendala Yuridis	231
4.2.3.2 Kendala Sosiologis	232
4.2.4 Evaluasi peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 terkait pengaturan kripto	233
4.2.5 Evaluasi terhadap UU No. 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terkait pengaturan kripto dan Evaluasi terhadap Peraturan OJK No.6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.....	235
4.2.6 Evaluasi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-	

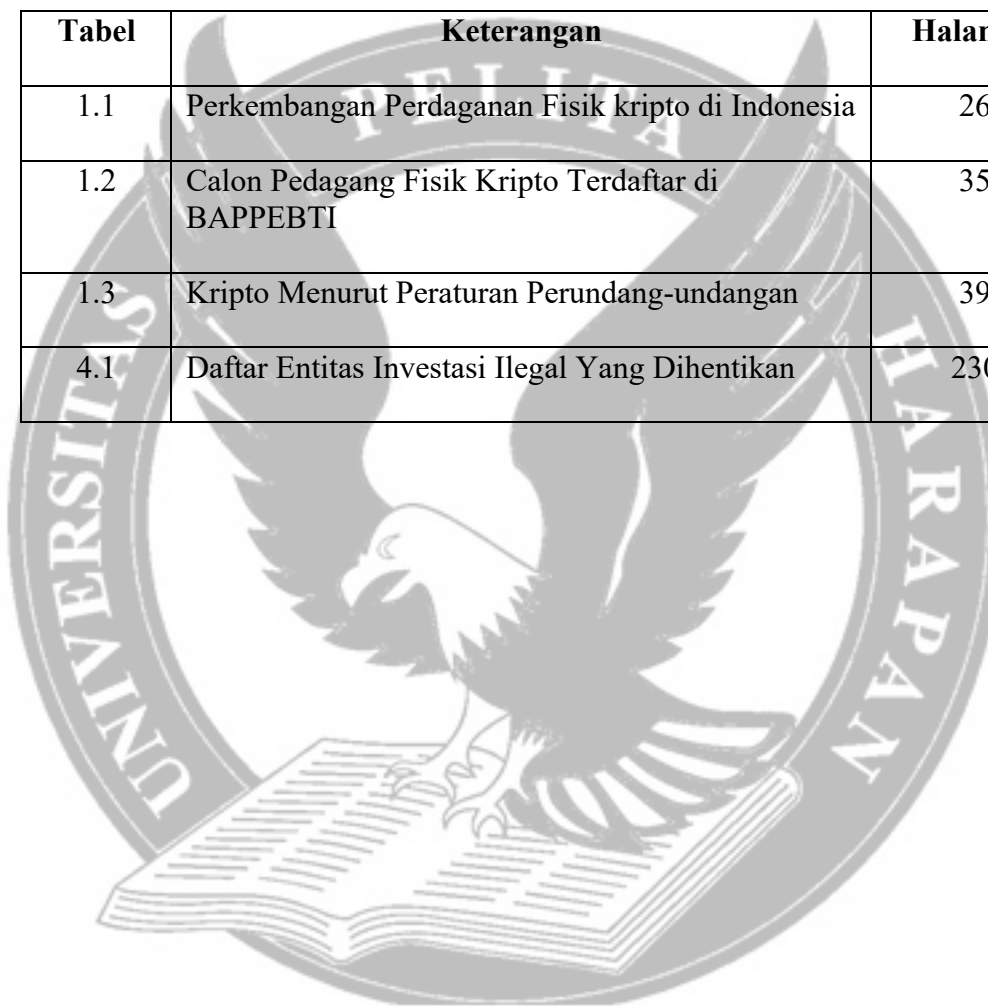
Undang terkait Pelindungan Konsumen	239
4.3 Usulan pengaturan yang ideal untuk pelindungan hukum bagi investor transaksi Blockchain.....	241
4.3.1 Kelemahan hukum terhadap pelindungan investor ditinjau dari undang-undang Republik Indonesia Nomor 8. Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen.....	243
4.3.2 Penguatan lembaga pelindungan konsumen di Indonesia	246
4.3.3 Tantangan yang terjadi dalam pelindungan investor dalam transaksi blockchain	250
4.3.4 Transisi peralihan pengaturan kripto untuk melindungi investor transaksi blockchain dari Bappebti ke OJK dan Kesiapan OJK untuk melindungi investor transaksi blockchain.....	259
4.3.5 Usulan pembaharuan upaya pelindungan hukum bagi investor kripto di bawah pengawasan OJK.....	270
BAB V PENUTUP	290
5.1. Kesimpulan	290
5.1.1 Kesimpulan rumusan permasalahan regulasi terkait transaksi cryptocurrency blockchain yang memberikan pelindungan kepada investor di Indonesia	292
5.1.2 Kesimpulan dari rumusan masalah implementasi peraturan terkait	

transaksi cryptocurrency blockchain yang memberikan perlindungan kepada investor di Indonesia.....	294
5.1.3 Kesimpulan dari rumusan masalah regulasi ideal mengenai transaksi mata uang kripto blockchain yang memberikan perlindungan investor di Indonesia.....	294
5.2. Saran / Rekomendasi	295
DAFTAR PUSTAKA	298
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	315



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
1.1	Perkembangan Perdagangan Fisik kripto di Indonesia	26
1.2	Calon Pedagang Fisik Kripto Terdaftar di BAPPEBTI	35
1.3	Kripto Menurut Peraturan Perundang-undangan	39
4.1	Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Dihentikan	230



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
1.1	Situasi Dan Kondisi Ekonomi Digital Indonesia	24
1.2	Peluang Dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia	27
1.3	Regulasi Mata Uang kripto	29
4.1	Hasil Survey Terkait Usia Responden	220
4.2	Hasil Survey Terkait Usia Responden	221
4.3	Hasil Survey Terkait Tempat Tinggal Responden	221
4.4	Hasil Survey Terkait Profesi / Pekerjaan Responden	222
4.5	Hasil Survey Terkait Usia Income / Take Home Pay Per Bulan dari Responden	222
4.6	Hasil Survey Terkait Tujuan Bertransaksi Dengan Blockchain	223
4.7	Hasil Survey Terkait Keamanan Bertransaksi Dengan Blockchain	223
4.8	Hasil Survey Terkait Kepercayaan Responden Bahwa Blockchain Dapat Mengurangi Risiko Penipuan Dalam Jual Beli	224
4.9	Hasil Survey Terkait Kekawatiran Privasi dan Kerahasiaan Data Pribadi Responden	224
4.10	Hasil Survey Terkait Kepercayaan Responden tentang Keandalan Blockchain dalam Pencatatan dan Verifikasi Transaksi Jual Beli	225
4.11	Perkembangan Edukasi Dan Perlindungan Konsumen	253